

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdul Atsar & Rani Aprian *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish (2019).
- Atsar, Abdul & Aprian, Rani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media / Pustaka lain (terbitan serupa pernah dipakai sebagai rujukan).
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2000). *Principles Of Marketing, Eight Edition*. New Jersey: Prentice Hall International Inc, 3, 177-508.
- Kristiyanti, C. T. S. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumadewi, Y. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Pernanda Media Group.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supari, S., Satria, P., Syndu, Y. P., & Lantar, B. A. (2022). *Optimalisasi Listrik Tenaga Surya Dalam Mobilitas Perahu (Metode Dan Analisanya)*.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

- Angriani, A., & Adha, L. H. (2025). Tanggung Jawab Perdata PT. PLN (Persero) Rayon Kota Dompu Dalam Kesalahan Pencatatan kWh Meter Listrik Konsumen. *Private Law*, 5(1).
- Ardhya, S. N. (2019). *Product Liability* Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (Pt. Pln Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 186-196.
- Ardhya, S. N., Dharmawan, N. K. S., Dewi, A. A. I. A. A., & Widiatedja, I. G. N. P. (2025). *Seller's Responsibility For Buyer's Losses In A Fair Ornamental Fish Sale And Purchase Agreement. European Alliance for Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 4(8), 4243–4254.
- Arifin, Y. R., & Hermawan, S. (2021). *Legal Analysis Of Dilematical Electrical Resources Policy In Electrical Supply Business In Indonesia. Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 2016-29.
- Aryani, R. (2023). Tanggung Jawab PT. PLN Atas Jual Beli Tenaga Listrik Terhadap Konsumen. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 494-500.
- Christovel, A. (2019). Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Kerugian Konsumen Yang Timbul Akibat Pemadaman Aliran Listrik. *Lex Privatum*, 7(1).
- Damayanty, D. N., & Riharjo, I. B. (2020). Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Objek Wana Wisata Coban Parang Tejo Malang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10).
- Dantes, K. F., Utama, I. M. A., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Bagiastra, I. N. (2025). *Notary Deed in the Implementation of Local Government Asset Grants as an Effort to Transfer Regional Property. Journal of Ecohumanism*, 3(8), 11256.
- Fachrudin, A. P., Ratnasari, A. R., & Abdullah, P. M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Listrik atas Pemadaman Listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Medan. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(2), 12-25.
- Faizin, I. (2017). Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah. *Madaniyah*, 7(2), 261-283.
- Hadjon, P. M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, dikutip dari Eli Wuria Dewi. *Perlindungan Hukum*.
- Himawan, C., & Hutabarat, S. M. D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA

PEMBERITAHUAN DIWILAYAH JAWA BARAT. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 32-50.

- Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 207-231.
- Jati, Imam.W. (2021). Fungsi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sebagai Penyedia Tenaga Listrik Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum keluarga Islam*, 1(2), 64-65
- Kusuma, I. G. D., & Budiarta, I. N. P. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Pemadaman Listrik yang dilakukan Secara Sepihak Oleh PT. PLN (Persero) UP3 Bali Selatan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 463-468.
- Lex Suprema, J., Muhammad Zein Alydrus, S., Lutfitasari, R., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Selatan, B., & Timur, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*.
- Marcelina, S. C. (2016). Tanggung jawab perusahaan listrik negara terhadap konsumen. *Lex Et Societatis*, 4(5).
- Nugraheni, R., & Eko Turisno, B. (2017). Perlindungan Konsumen Listrik Pt Pln (Persero) Terhadap Harga Listrik Yang Wajar. In *Diponegoro Law Journal* (Vol. 6, Number 1).
- Paat, T. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Perusahaan Listrik Negara. *Lex Privatum*, 7(7).
- Pradnyani, W. E., Putra, K. S. W., Nandari, N. P. S., & Mahadewi, K. J. (2025). Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektronik Akibat Pemadaman Listrik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 276-288.
- Pratiwi, T., & Lubis, M. T. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. *UNES Law Review*, 6(3), 8174-8179.
- Ritonga, N. H. A., & Syam, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT PLN (Persero) Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1999. *UNES Law Review*, 5(4), 4788-4796.
- Rumampuk, A. M. (2017). Tanggung Jawab Hukum Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 5(5).
- Sapthu, A. (2023). Listrik Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 199-207.
- Sari, N., & Soumadiyono, S. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik oleh PT. Pln (Persero) di Kota Jambi. *Lex Specialist*, (22), 58-67.

- Skoczny, T. (2011). *Consolidation of the Polish Electricity Sector. The Merger Law Perspective. Published in Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies*, 4.
- Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Di Indonesia. *Journal Equitable*, 3(2), 47-58.
- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025, January). Urgensi Pengaturan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Dan Solusi Hukum Di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 5, No. 1, pp. 16-22).
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Yasmiati, N. L. W. (2022). Implementasi Dan Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*) Dalam Melakukan Perjanjian Di Dalam Masyarakat Untuk Menjamin Adanya Keseimbangan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 42-49.

SKRIPSI

- Febriana, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ketenagalistrikan PT.PLN (Persero) Akibat Pemadaman Listrik (Studi Penelitian Pada PT.PLN (Persero) Kabupaten Bireuen). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Risqiyah, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Banyuwangi Dalam Kasus Pemadaman Listrik Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masalah Mursalah (Studi di PT. PLN (Persero) Banyuwangi). (Skripsi). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Detik, 100 Ikan Koi Warga OKI Mati Gegara Listrik Padam, Diakses pada tanggal 9 Mei 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7377415/100-ikan-koi-warga-oki-mati-gegara-listrik-padam>
- PLN, PLN Akan Berikan Kompensasi Bagi Pelanggan Yang Terkena Pemadaman, Diakses pada tanggal 11 Mei 2025, <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2019/08/pln-akan-berikan-kompensasi-bagi-pelanggan-yang-terkena-pemadaman/>
- Tempo, Cerita Pengusaha Ikan Hias soal Kerugiannya Akibat Pemadaman Listrik di Bali, Diakses pada tanggal 8 Mei 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-pengusaha-ikan-hias-soal-kerugiannya-akibat-pemadaman-listrik-di-bali--1344235>
- Purnama, B. E. (2025, 20 Mei). DPRD Bali Minta PLN Ganti Kerugian Warga Saat Pemadaman Listrik Selama 10 Jam. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2025

pada https://mediaindonesia.com/nusantara/773924/dprd-bali-minta-pln-ganti-kerugian-warga-saat-pemadaman-listrik-selama-10-jam#goog_rewarded

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 dan Lembaran Tambahan Nomor 330)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281)

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero).